YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v5i5.6810

IMPLEMENTASI PROGRAM DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI MASYARAKAT PESISIR OLEH POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT

Implementation of the Community Empowerment Training Program (DPM) in Improving the Competence of Coastal Communities by the Sumatra Barat Maritime Polytechnic

Richa Anggelina & Rahmadhona Fitri Helmi
Universitas Negeri Padang
anggelinaricha@gmail.com; rahmadhonafh@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 11, 2025	Jul 6, 2025	Jul 18, 2025	Jul 23, 2025

Abstract

Enhancing the capacity of coastal communities in the field of maritime navigation is a strategic effort to support national maritime development. One such initiative is the *Diklat Pemberdayaan Masyarakat* (DPM) program organized by the Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. This study aims to analyze the implementation of the DPM program using the policy implementation model developed by George C. Edwards III, which includes four key variables: communication, resources, disposition of implementers, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. The research focused on evaluating the effectiveness of the program in reaching coastal communities as the primary target group. The findings indicate that the DPM program has been implemented with a fair degree of effectiveness, as evidenced by high community participation and strong field-level commitment. All four variables in Edwards's model contributed positively to the implementation, although challenges remain, such as

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

participants' limited understanding of the training material and inconsistencies in recruitment information. The main supporting factors for the program's success were the flexibility and proactive attitude of its implementers. The study concludes that the DPM program has successfully improved maritime skills among coastal populations; however, improvements in coordination and adaptive implementation are needed to ensure the program's sustainability and long-term effectiveness.

Keywords: Policy Implementation; DPM; Coastal Communities; Poltekpel Sumbar; George C. Edwards III

Abstrak: Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dalam bidang pelayaran merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan maritim nasional, salah satunya melalui Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) yang diselenggarakan oleh Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program DPM dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian tertuju pada efektivitas pelaksanaan program dalam menjangkau masyarakat pesisir sebagai kelompok sasaran prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program DPM terlaksana dengan cukup efektif, ditandai oleh tingginya partisipasi masyarakat dan komitmen para pelaksana di lapangan. Keempat variabel model Edwards telah berperan dalam mendukung implementasi program, meskipun masih terdapat kendala, seperti rendahnya pemahaman peserta terhadap materi pelatihan serta inkonsistensi informasi dalam proses rekrutmen. Faktor pendukung utama keberhasilan program adalah fleksibilitas dan sikap proaktif dari pelaksana. Kesimpulan dari kajian ini menyatakan bahwa program DPM berhasil meningkatkan keterampilan masyarakat pesisir di bidang pelayaran, namun dibutuhkan perbaikan dalam aspek koordinasi dan adaptasi implementasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ke depan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; DPM; Masyarakat Pesisir; Poltekpel Sumbar; George C. Edwards III

PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir (Lomboan et al., 2021; Nikijuluw, 2001). Masyarakat pesisir merupakan kumpulan individu yang rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, penambang pasir, pembudidaya ikan, dan transportasi laut yang sama-sama mendiami suatu wilayah pesisir serta membentuk kebudayaan yang khas terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir (Prayuda, 2019).

Menurut Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia yang disusun oleh Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrologi dan Oseanografi TNI AL (2018), luas total perairan lndonesia adalah sebesar 6,4 juta km². Sementara luas daratan Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 adalah sebesar 1.916.906,77 km². Dengan perkataan lain, dua per tiga wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang tinggi (Ramadhani, 2023). Aktivitas yang berkenaan dengan kelautan menjadi suatu hal yang banyak dilakukan oleh penduduk Indonesia yang tersebar di 12.879 desa yang berbatasan langsung dengan laut (Prasetya, 2024; Ramadhani, 2023).

Kondisi masyarakat pesisir saat ini termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi tertinggal. Selain itu, banyak dimensi kehidupan lainnya yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir (Sabarisman, 2017). Mereka memiliki cara yang berbeda dalam hal pengetahuan, peranan sosial, kepercayaan, dan struktur sosialnya. Sementara itu dibalik keberagamannya masyarakat pesisir tidak mampu dalam mengatasi masalah yang hadir (Ghazy & Adrian, 2025). Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat pesisir adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, yang menyebabkan keterbatasan dalam memanfaatkan peluang ekonomi di sektor maritim (Anwar & Wahyuni, 2019; Riesnandar & Nuhartonosuro, 2025). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, lebih dari 60% nelayan di Indonesia hanya memiliki tingkat pendidikan dasar, yang mengakibatkan rendahnya daya saing mereka dalam industri kelautan modern (Badan Pusat Statisttik, 2020).

Untuk itu perlu adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan (Kamuli et al., 2023; Rahmanto & Purwaningsih, 2016). Program pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan salah satu program yang berkesinambungan, yang terkait dalam pengembangan kondisi dan situasi suatu daerah juga tentang masyarakat pesisir. Melalui pelaksanaan pemberdayaaan masyarakat pesisir dalam pembangunan juga diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang ada di daerah pesisir (Siti Hajar, dkk, 2018). Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat bottom up dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran (Agustina & Imaniar, 2021; Hasan & Azlina, 2015; Trihandoyo et al., 2019). Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir idealnya difokuskan pada pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh desa masing-masing (Prihanta et al., 2020; Rahmanto & Purwaningsih, 2016). Namun, potensi

besar yang ada di wilayah pesisir belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga banyak masyarakat pesisir di Indonesia masih hidup dalam kemiskinan dan belum mencapai tingkat kesejahteraan yang layak (Nuryanto & Haryono, 2017).

Kementerian Perhubungan juga melalui BPSDM Perhubungan dan Unit-unit Pelaksana Teknisnya memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat umum dan masyarakat pesisir dalam peningkatan sektor maritim melalui program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran dan mendukung terwujudnya keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketepatan waktu. BPSDMP mulai melaksanakan DPM sejak tahun 2016 yang bekerjasama dengan beberapa Instansi dan *stakeholder* guna mencari minat para peserta untuk dididik dan dilatih secara profesional oleh Instruktur yang ahli di bidangnya. Dan pada tahun 2018 BPSDMP menyediakan kuota bagi 100.000 peserta yang tersebar pada 23 (dua puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai wilayah Indonesia. Sesuai dengan isi yang terdapat didalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi (Kemenhub, 2024).

Program DPM merupakan pendidikan dan pelatihan gratis bagi masyarakat yang berijazah minimal SLTP dan berusia minimal 16 Tahun, yang diprioritaskan bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terluar, terisolisir, rawan bencana dan perbatasan. Program ini bertujuan membekali kompetensi kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja. DPM secara langsung berkontribusi dalam peningkatan kompetensi masyarakat pesisir dengan memberikan pelatihan berbasis kebutuhan industri maritim yang mencakup aspek keselamatan, navigasi, dan keterampilan teknis

Sejalan dengan temuan Prayoga et al. (2022) yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis sertifikasi meningkatkan kapasitas peserta dalam menangani situasi darurat di laut, mengoperasikan peralatan keselamatan, serta memahami regulasi pelayaran yang berlaku. Selain itu, penelitian Rahayu dan Saputra (2023) mengungkapkan bahwa pelatihan yang diberikan dalam program DPM juga membantu peserta dalam meningkatkan keterampilan teknis seperti navigasi dasar, perawatan mesin kapal, dan teknik penangkapan ikan yang lebih efisien. Dengan adanya peningkatan kompetensi ini, masyarakat pesisir tidak hanya

lebih siap untuk menghadapi tantangan di sektor maritim tetapi juga memiliki daya saing lebih tinggi dalam memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan berkelanjutan. Namun, efektivitas program ini masih dipengaruhi oleh faktor seperti keterbatasan fasilitas pelatihan, akses informasi yang kurang merata, serta minimnya pendampingan pascapelatihan (Kemenhub, 2023).

Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumbar) merupakan salah satu sekolah kedinasan yang berada dibawah naungan Kementerian Perhubungan telah menjalankan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat sejak tahun 2019 yang diikuti oleh 1643 peserta yang teridri dari: siswa SMK, nelayan, dan masyarakat kurang mampu di Sumatera Barat dan sekitarnya. Sebanyak 1643 peserta tersebut, yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman 561 Orang; Kota Pariaman 258 Orang, Kota Padang 89 Orang, kabupaten Pasaman Barat 209 Orang, Kabupaten Agam 82 Orang, dan Kabupaten Pesisir Selatan 444 Orang (Kemenhub, 2019).

Poltekpel Sumbar secara rutin menyelenggarakan Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) setiap tahunnya sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang kepelautan. Program ini diberikan secara gratis dan bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan serta sertifikasi resmi agar lebih siap bersaing di industri maritim. Pada tahun 2022, Poltekpel Sumbar juga mengadakan DPM di Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, bekerja sama dengan Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang. Pada tahun 2023, Poltekpel Sumbar juga bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tembilahan menyelenggarakan diklat yang meliputi Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM) dan Sertifikat Kecakapan Kapal (SKK) 60 Mil, dengan tujuan meningkatkan keterampilan awak kapal dalam hal keselamatan dan navigasi.

Kemudian salah satu program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Terminal Anak Air. Program ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi Seleksi Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar) Kementerian Perhubungan.

Namun, dalam pelaksanaan program tersebut terdapat permasalahan yang menghambat program Diklat Pemberdayaan Masyarakat oleh Poltekpel Sumbar. Permasalahan yang sering muncul dari sisi peserta adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program DPM karena minimnya sosialisasi dari Poltekpel Sumbar. Oleh karena itu, sebagian masyarakat pesisir masih menganggap bahwa

sertifikasi kepelautan tidak terlalu penting dalam pekerjaan mereka, terutama bagi nelayan kecil dan pekerja kapal tradisional. Mereka lebih fokus pada pengalaman kerja dibandingkan sertifikasi formal, padahal sertifikat tersebut bisa membuka peluang kerja yang lebih luas, baik di kapal niaga maupun industri maritim lainnya.

Kondisi ini menunjukkan kurangnya efektivitas diklat, meskipun materi pelatihan telah disusun dengan baik. Tanpa adanya dukungan fasilitas diklat yang memadai, maka diklat hanya bersifat teoritis saja. Karena dalam diklat sebaiknya memastikan pembelajaran yang diberikan dapat diterapkan secara langsung di lapangan.

Kemudian, belum adanya kepastian mendapatkan pekerjaan bagi peserta yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat. Meskipun sertifikasi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta di dunia kerja, nyatanya banyak dari mereka masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pelatihan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dalam penguatan kompetensi masyarakat pesisir di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam program tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami implementasi Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dalam penguatan kompetensi masyarakat pesisir oleh Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dengan fokus pada permasalahan implementasi program DPM. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mengacu pada triangulasi data, yaitu menggabungkan berbagai sumber dan teknik untuk meningkatkan validitas informasi. Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, yang terdiri dari informan kunci seperti Kepala Unit Kepelatihan dan staf Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, serta informan pendukung yang melibatkan instruktur pelatihan, teknisi, dan masyarakat pesisir yang pernah mengikuti program DPM. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses reduksi, data disaring

dan disederhanakan untuk memperoleh informasi yang relevan, sementara penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi dan diagram untuk memberikan gambaran jelas mengenai hasil penelitian. Kesimpulan ditarik setelah verifikasi data dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada informan terkait temuan awal. Teknik triangulasi sumber dan teknik ini digunakan untuk memastikan kredibilitas dan keakuratan data yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang implementasi program DPM di lapangan dan dampaknya terhadap kompetensi masyarakat pesisir.

HASIL

Bagian ini menyajikan temuan utama yang diperoleh dari analisis, yang dibagi menjadi subtopik-subtopik yang langsung berkaitan dengan fokus penelitian. Temuan ini didukung oleh data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil ini menekankan tema-tema utama yang ditemukan serta implikasinya, tanpa membahas secara rinci proses analisis data.

1. Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Implementasi kebijakan publik tidak hanya berhenti pada perencanaan teknis atau formulasi, tetapi harus dilihat secara menyeluruh mulai dari tahap sosialisasi, pelaksanaan, hingga evaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Program **Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM)** oleh Politeknik Pelayaran Sumatera Barat merupakan kebijakan afirmatif dari Kementerian Perhubungan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat pesisir dalam bidang pelayaran dan keselamatan kerja laut. Target dan Realisasi Peserta DPM dapat dilihat pada table 1 berikut ini.

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Peserta DPM

No	Tahun Pelaksanaan DPM	Target Peserta	Realisasi Peserta	Jenis Pelatihan
1.	Tahun 2019	94.172	5.718	BST, AFF, SAT, BST KLM, CMT KLM, CMHBT KLM, SKK 60 (Deck/Mesin), dan Dasar-dasar Kesyahbandaran.
2.	Tahun 2021	3906	3.759	BST, AFF, SAT, SDSD, CMT, CMHBT, MFA, BST KLM, SKK 60 (Deck/Mesin),
3.	Tahun 2023	15.500	7.977	BST, AFF, SAT, SDSD, BST KLM, SKK 60 (Deck/Mesin),
4.	Tahun 2024	7.246	7.246	BST, AFF, SAT, dan SDSD

Sumber : Laporan Kegiatan DPM Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

Tabel 1 menyajikan informasi mengenai pelaksanaan Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) oleh Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat dari tahun 2019 hingga 2024. Data yang ditampilkan meliputi target peserta, realisasi peserta, serta jenis pelatihan yang diselenggarakan pada masing-masing tahun pelaksanaan.

Pada tahun 2019, target peserta DPM ditetapkan sebanyak 94.172 orang, namun realisasi peserta hanya mencapai 5.718 orang, atau sekitar 6% dari target. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan realisasi. Jenis pelatihan yang dilaksanakan cukup beragam, antara lain BST, AFF, SAT, BST KLM, CMT KLM, CMHBT KLM, SKK 60 (Deck/Mesin), serta Dasar-dasar Kesyahbandaran. Banyaknya jenis pelatihan menunjukkan cakupan kompetensi yang luas, meskipun pencapaian jumlah peserta masih rendah.

Setelah vakum pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, pelaksanaan DPM kembali dilanjutkan pada tahun 2021 dengan target 3.906 peserta dan realisasi 3.759 peserta, yang berarti tingkat pencapaian sangat tinggi, yakni sekitar 96%. Jenis pelatihan yang diselenggarakan tetap mencakup pelatihan dasar pelaut seperti BST, AFF, SAT, serta tambahan pelatihan seperti SDSD, CMT, CMHBT, MFA, BST KLM, dan SKK 60 (Deck/Mesin). Pencapaian ini menunjukkan peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan program.

Pada tahun 2023, target peserta kembali ditingkatkan menjadi 15.500 orang, dengan realisasi sebanyak 7.977 peserta, atau sekitar 51% dari target. Angka ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2019 namun masih belum mencapai target maksimal. Jenis pelatihan yang diberikan lebih difokuskan pada pelatihan dasar keselamatan dan keterampilan pelaut, seperti BST, AFF, SAT, SDSD, BST KLM, dan SKK 60 (Deck/Mesin).

Pada tahun 2024, pelaksanaan DPM menunjukkan capaian yang sangat optimal, dengan target dan realisasi peserta yang sama yaitu 7.246 orang (100% pencapaian). Ini menjadi satu-satunya tahun dalam rentang waktu tersebut yang mencapai target secara penuh. Jenis pelatihan yang diselenggarakan mencakup BST, AFF, SAT, dan SDSD, yang merupakan pelatihan dasar yang menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat maritim.

Pelaksanaan Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) oleh Poltekpel Sumbar mengalami fluktuasi dari segi target dan realisasi peserta selama periode 2019–2024. Meskipun pada awal pelaksanaan tahun 2019 realisasi peserta sangat rendah dibandingkan target, capaian program meningkat secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya, dengan pencapaian terbaik terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 100% dari target. Jenis pelatihan

juga mengalami penyederhanaan dan lebih difokuskan pada pelatihan dasar keselamatan pelaut, yang mencerminkan strategi implementasi yang semakin efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

a. Perencanaan dan Realisasi Anggaran DPM

Data penggunaan anggaran DPM terlihat pada table 2 berikut ini.

Tabel 2. Data Penggunaan Anggaran DPM

No.	Tahun Pelaksanaan DPM	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Tahun 2019	Rp. 26.576.203.000	Rp. 14.120.207.388
2.	Tahun 2021	Rp. 2.452.271.000	Rp. 1.391.801.549
3.	Tahun 2023	Rp. 15.657.435.000	Rp. 15.657.435.000
4.	Tahun 2024	Rp. 9.654.708.000	Rp. 9.624.139.744

Sumber : Laporan Kegiatan DPM Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

Tabel 2. terdapat data anggaran Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Poltekpel Sumbar dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan efisiensi dan akurasi dalam penggunaan dana. Pada tahun 2019, dari rencana anggaran sebesar Rp26,57 miliar, hanya terealisasi sekitar Rp14,12 miliar, menandakan pemanfaatan anggaran yang masih jauh dari optimal. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2021, dengan realisasi sebesar Rp1,39 miliar dari rencana Rp2,45 miliar. Namun, pada tahun 2023 terjadi perbaikan signifikan, di mana seluruh anggaran sebesar Rp15,65 miliar berhasil direalisasikan secara penuh.

Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dengan realisasi sebesar Rp9,62 miliar dari rencana Rp9,65 miliar, atau setara dengan 99,7%. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan DPM semakin terencana dan tepat sasaran, serta menunjukkan kemampuan institusi dalam menyesuaikan alokasi dana dengan kebutuhan program secara efisien.

b. Pelaksanaan Pelatihan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

Pada bulan Juni 2025 Politeknik Pelayaran Sumatera Barat melaksanakan Pelatihan Advanced Fire Fighting(AFF) dalam rangkaian Diklat Keterampilan Pelaut yang diadakan langsung di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Sebelumya telah dilaksanakan Pelatihan Basic Safety Training (BST) selama 9 hari yang diikuti oleh berbagai masyarakat umum yang berasal dari Sumatera Barat maupun luar Sumatera Barat. Adapun brosur pendaftaran Diklat Keterampilan Pelaut yang diadakan oleh Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Brosur Diklat Keterampilan Pelaut

Pada Gambar 1. Diklat Keterampilan Pelaut yang diadakan oleh Politeknik Pelayaran Sumatera Barat terlihat memiliki kesamaan karakteristik dalam hal tujuan pemberdayaan, bentuk kegiatan, dan sasaran peserta dengan Diklat Pembedayaan Masyarakat (DPM) hanya saja diklat ini berbayar sedangkan Program DPM itu gratis dan dibiayai oleh pemerintah. Oleh karena itu peneliti melakukan observasi pada tanggal 24 Juni 2025 pada Pelatihan Advanced Fire Fighting(AFF) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelatihan yang diadakan secara langsung di Politekniik Pelayaran Sumatera Barat.

Terdapat 40 peserta yang terdaftar dalam pelatihan AFF, 15 diantaranya berhalangan hadir pada saat pelaksanaan pelatihan berlangsung dengan beberapa alasan yaitu keterlambatan datang, jauhnya rumah peserta dari lokasi pelatihan, dan 5 diantaranya tanpa keterangan. Peserta tersebut berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat seperti Bungus, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pasaman Barat, Payakumbuh, Solok, dll. Dimana sebagian besar merupakan masyarakat pesisir Sumatera Barat. Foto bersama dengan peserta dan pengajar pelatihan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Foto Bersama dengan Pengajar dan Peserta Pelatihan di Bangunan Kapal Batu

Pada Gambar 2. dapat terlihat bahwa pelatihan AFF ini dipandu oleh instruktur berpengalaman, Bapak Hasri Devin, dengan pendampingan dari teknisi, Bapak Akmal, yang membantu pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan. Dalam sesi praktik, peserta diperkenalkan dan diarahkan menggunakan berbagai alat pemadam kebakaran, seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan), fire hose (selang pemadam), *hydrant system*, dan penggunaan *fire blanket*. Instruktur menjelaskan teknik pemadaman api berdasarkan jenis bahan yang terbakar, serta prosedur evakuasi dalam kondisi darurat kebakaran di kapal.. Adapun proses pelaksanaan pelatihan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Pelaksanaan Pelatihan di Bangunan Kapal Batu Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

Pada Gambar 3. terlihat suasana pelatihan berlangsung cukup interaktif, ditandai dengan tanya jawab dan keterlibatan peserta dalam simulasi. Namun demikian, peneliti mengamati bahwa beberapa peserta tampak kesulitan memahami materi teknis, terutama dalam hal penggunaan alat berat dan teknik pemadaman api secara berurutan. Menanggapi hal tersebut, Bapak Hasri Devin menekankan bahwa pelatihan seperti ini sangat penting untuk keselamatan di kapal. Beliau menyampaikan bahwa setiap pelaut wajib memiliki minimal empat sertifikat keselamatan, yaitu Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), Crowd Management Training (CMT), dan Survival Craft and Rescue Boat

(SAT). Menurutnya, tanpa penguasaan terhadap keterampilan dasar tersebut, pelaut akan sangat berisiko saat menghadapi keadaan darurat di laut.

Pelatihan ini memberikan gambaran nyata tentang pentingnya kompetensi keselamatan bagi para pelaut, sekaligus menunjukkan keseriusan Poltekpel Sumbar dalam membekali peserta dengan keterampilan yang relevan dan aplikatif di lapangan.

Implementasinya, meskipun menunjukkan kemajuan, masih menghadapi beberapa tantangan sistemik yang perlu diperhatikan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

a. Komunikasi

1) Transmisi (Penyampaian Informasi)

Komunikasi yang baik sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam Program DPM, informasi disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk kerjasama dengan instansi daerah, sosialisasi langsung, dan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Namun, proses transmisi informasi di lapangan masih menghadapi tantangan terkait terbatasnya jangkauan dan ketergantungan pada saluran informal. **Tabel 3** menunjukkan metode komunikasi yang digunakan dan efektivitasnya.

Tabel 3. Metode Penyampaian Informasi dalam Program DPM

Metode	Deskripsi	Efektivitas
Kerjasama dengan Instansi Daerah	Informasi disebarkan melalui KSOP, SMK, dan pemerintah daerah.	Efektif di daerah lokal.
Penyuluhan oleh Tokoh Masyarakat	Tokoh masyarakat menyampaikan informasi langsung kepada warga.	Jangkauan terbatas.
Media Sosial	Informasi disebarkan melalui saluran media sosial yang tidak terlalu banyak digunakan.	Belum maksimal digunakan.

2) Kejelasan Isi Pesan *(Clarity of Message)*

Meskipun informasi telah disampaikan, tidak semua peserta memahami pesan dengan mudah. Oleh karena itu, kejelasan isi pesan menjadi indikator penting dalam efektivitas komunikasi. Para pelaksana berusaha menyederhanakan bahasa dan materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta dengan latar belakang pendidikan rendah. Penggunaan bahasa daerah, pendekatan visual, dan metode pengajaran dua arah menjadi strategi utama untuk menyampaikan pesan dengan jelas.

3) Konsistensi Antar Pelaksana *(Consistency Among Implementers)*

Di lapangan, konsistensi komunikasi antar pelaksana tidak selalu terjaga. Beberapa peserta mengaku menerima informasi yang berbeda antara pendaftaran dan pelaksanaan, terutama terkait waktu, tempat, atau kelengkapan administrasi. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam alur komunikasi internal yang seharusnya dijaga agar tidak terjadi kebingungan atau ketidakpercayaan dari peserta.

b. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia *(Human Resources)*

Keberadaan SDM yang kompeten sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program. Namun, di beberapa lokasi pelatihan dengan kuota besar, keterbatasan SDM mulai terasa. Ini menyebabkan pelaksana harus bekerja di luar jobdesk mereka, yang menunjukkan bahwa distribusi SDM harus lebih proporsional dan tenaga pendukung baru perlu diberikan pelatihan teknis.

2) Sumber Daya Anggaran *(Financial Resources*)

Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi pelaksanaan program, terutama dalam pengadaan fasilitas dan peralatan. Pelaksana terpaksa berimprovisasi dengan menggunakan alat seadanya dan membatasi jumlah peserta, yang berdampak pada kualitas pelatihan.

3) Sumber Daya Peralatan *(Equipment Resources)*

Pelaksanaan pelatihan di daerah terpencil menghadapi tantangan terkait keterbatasan alat dan fasilitas. Meskipun instruktur beradaptasi dengan menggunakan lokasi alternatif seperti sungai atau pelabuhan terbuka, kurangnya peralatan memengaruhi kualitas simulasi yang dilakukan selama pelatihan.

c. Disposisi *(Disposition)*

Disposisi para pelaksana kebijakan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program. Mayoritas pelaksana menunjukkan komitmen tinggi, tidak hanya mengajar tetapi juga membantu peserta dengan administrasi atau mendukung mereka secara ekstra selama pelatihan. Namun, beberapa peserta memiliki sikap yang kurang disiplin, yang memperlambat pelaksanaan program.

1) Pengangkatan Birokrasi *(Bureaucratic Appointment*)

Pelaksana kebijakan dipilih dari internal Poltekpel Sumbar yang sudah berpengalaman dan memahami karakteristik masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa penunjukan pelaksana dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan kedekatan sosial, yang mendukung terciptanya suasana kerja yang empatik dan adaptif.

d. Struktur Birokrasi *(Bureaucratic Structure)*

1) SOP *(Standard Operating Procedure)*

Meskipun SOP pelaksanaan program sudah ada, dalam praktiknya pelaksana harus menyesuaikan prosedur dengan kondisi lapangan, seperti peserta yang tidak lengkap dokumennya atau lokasi pelatihan yang berubah mendadak. Fleksibilitas dalam SOP diperlukan agar pelaksanaan tetap efektif tanpa menyimpang dari pedoman utama program.

2)Fragmentasi *(Fragmentation of Coordination)*

Koordinasi yang lemah antar bagian, seperti administrasi, instruktur, dan teknisi, menghambat kelancaran pelaksanaan program. Beberapa peserta mengeluhkan adanya perbedaan informasi yang mereka terima antara saat pendaftaran dan pelaksanaan, yang menunjukkan perlunya sistem koordinasi yang lebih kuat.

2. Kendala Pelaksanaan Program DPM

a. Kendala Internal *(Internal Challenges)*

Kendala internal yang ditemukan dalam pelaksanaan Program DPM mencakup masalah komunikasi antar divisi, fasilitas yang terbatas, serta sikap peserta yang kurang disiplin. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen internal dan koordinasi antar bagian, agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif.

b. Kendala Eksternal *(External Challenges)*

Di sisi eksternal, tantangan terbesar berasal dari karakteristik geografis dan sosial masyarakat pesisir. Banyak peserta yang kesulitan mengakses informasi, memiliki kesulitan dengan prosedur administratif, serta menghadapi kendala transportasi untuk hadir tepat waktu. Selain itu, setelah pelatihan selesai, banyak peserta yang bingung tentang bagaimana memanfaatkan sertifikat yang mereka peroleh, yang menunjukkan perlunya sistem pendampingan setelah pelatihan.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam artikel ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, menafsirkan dan menganalisis temuan lapangan dalam kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, serta mengevaluasi bagaimana aspek-aspek utama dalam model tersebut berperan dalam konteks pelaksanaan Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) oleh Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Selain itu, pembahasan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan atau modifikasi model implementasi kebijakan dalam konteks lokal, serta menawarkan arah baru bagi pengembangan program dan penelitian lanjutan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir.

Secara konseptual, Adiwinarni et al. (2020) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Temuan lapangan pada penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berperan secara sinergis, namun tidak tanpa tantangan. Pada aspek komunikasi, meskipun telah dilakukan sosialisasi melalui kerja sama dengan instansi daerah, tokoh masyarakat, dan media sosial, transmisi informasi belum merata dan konsisten. Masih ditemukan adanya fragmentasi informasi, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses digital dan rendahnya literasi informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi yang digunakan belum sepenuhnya adaptif terhadap konteks geografis dan sosial masyarakat sasaran. Temuan ini sejalan dengan pendapat Amalia (2024) yang menyatakan bahwa komunikasi yang tidak menyeluruh dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam program kebijakan. Meskipun pelaksana program telah mencoba menyederhanakan pesan dan menggunakan pendekatan berbasis bahasa lokal serta media visual, efektivitas penyampaian informasi masih memerlukan penguatan, khususnya dalam menjaga konsistensi antarunit pelaksana.

Pada dimensi sumber daya, data menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam efisiensi penggunaan anggaran, di mana realisasi anggaran meningkat dari hanya 53% pada tahun 2019 menjadi 99,7% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan program, yang selaras dengan temuan Walizi & Kom (2025) mengenai pentingnya efisiensi anggaran berbasis kebutuhan lokal. Namun, distribusi sumber daya manusia dan peralatan pelatihan belum merata. Di beberapa lokasi pelatihan, pelaksana harus merangkap tugas akibat kekurangan instruktur dan teknisi, sedangkan keterbatasan alat

praktik menyebabkan kualitas pelatihan keselamatan laut menjadi suboptimal. Implikasi dari ketidakseimbangan ini adalah perlunya strategi perencanaan sumber daya yang lebih berbasis data dan bersifat adaptif terhadap lokasi, agar kualitas pelaksanaan program dapat seragam dan inklusif.

Disposisi pelaksana juga terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi. Sebagian besar pelaksana menunjukkan sikap yang responsif, antusias, dan memiliki komitmen tinggi untuk membantu peserta secara menyeluruh, tidak hanya dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam menyelesaikan kendala administratif. Temuan ini mendukung asumsi Edwards bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh sikap dan motivasi para pelaksana. Namun demikian, motivasi ini tidak selalu berbanding lurus dengan partisipasi peserta. Masih terdapat kendala berupa rendahnya kedisiplinan, ketidakhadiran tanpa keterangan, serta sikap pasif dari sebagian peserta. Faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat bergantung semata pada pelaksana, tetapi juga membutuhkan desain pelatihan yang mampu meningkatkan keterlibatan aktif peserta secara berkelanjutan.

Dari segi struktur birokrasi, pelaksanaan Program DPM menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan Standard Operating Procedures (SOP) dengan kondisi lapangan. Penyesuaian ini mencakup pengubahan lokasi pelatihan, penyederhanaan dokumen administratif, serta improvisasi sarana pelatihan. Namun, fleksibilitas ini belum diimbangi oleh koordinasi internal yang kuat antarunit, seperti antara bagian administrasi, instruktur, dan teknisi. Inkonsistensi informasi mengenai jadwal pelatihan, kelengkapan dokumen, serta perubahan mendadak dalam pelaksanaan kegiatan menjadi indikator lemahnya koordinasi struktural. Hal ini memperkuat temuan Walizi & Kom (2025) yang menyatakan bahwa koordinasi antarunit merupakan prasyarat penting dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan peserta terhadap program pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan sistem koordinasi internal berbasis teknologi informasi dan pemetaan alur kerja yang lebih sistematis.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, studi ini memberikan kontribusi kontekstual yang relevan. Penelitian Mochklas et al. (2023) menyoroti pentingnya pelatihan bersertifikasi dalam meningkatkan keterampilan teknis masyarakat pesisir. Namun, keduanya belum secara eksplisit membahas dimensi implementatif seperti hambatan administratif, respons sosial peserta, dan dampak koordinasi internal terhadap efektivitas program.

Penelitian ini memperluas cakupan pembahasan dengan mengangkat tantangan mikro yang justru berpengaruh besar terhadap keberhasilan jangka panjang program pelatihan. Dengan demikian, temuan ini berpotensi memodifikasi pemahaman teoretis terhadap model implementasi kebijakan publik, khususnya dengan menekankan pentingnya responsivitas struktural dan partisipasi komunitas lokal dalam desain kebijakan.

Adapun implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah pentingnya sistem komunikasi publik yang bersifat partisipatif dan adaptif, distribusi sumber daya yang proporsional dan berbasis kebutuhan wilayah, serta penguatan koordinasi birokrasi untuk menjaga konsistensi pelaksanaan. Program DPM dinilai telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi masyarakat pesisir, namun dampak ini masih bersifat variatif tergantung pada kesiapan teknis dan sosial di masing-masing wilayah pelaksanaan. Oleh karena itu, evaluasi keberhasilan program tidak cukup hanya didasarkan pada output kuantitatif seperti jumlah peserta atau sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga harus mempertimbangkan outcome jangka panjang seperti peningkatan daya saing kerja, perbaikan kesejahteraan, dan keberlanjutan praktik keselamatan laut di komunitas sasaran.

Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan penguatan sistem komunikasi berbasis komunitas yang menjangkau masyarakat dengan literasi digital rendah, pengembangan unit pelatihan satelit untuk daerah terpencil, serta pendampingan pascapelatihan agar sertifikasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal dalam dunia kerja. Selain itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang program terhadap peningkatan taraf hidup peserta melalui pendekatan longitudinal, serta untuk mengkaji model-model koordinasi kelembagaan yang paling efektif dalam program pelatihan multi-lokasi di wilayah pesisir. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian evaluatif terhadap implementasi program DPM, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan model implementasi kebijakan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan masyarakat pesisir Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) oleh Politeknik Pelayaran Sumatera Barat melalui pendekatan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil

temuan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa program ini secara umum telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kompetensi masyarakat pesisir, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya bebas dari kendala teknis dan struktural.

Dari segi komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan melalui berbagai saluran, namun belum merata dan konsisten. Perbedaan pemahaman serta keterbatasan akses digital di daerah terpencil masih menjadi tantangan. Pada aspek sumber daya, pelaksana program menunjukkan dedikasi tinggi, namun realisasi pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alat, waktu pelatihan yang terbatas, dan alokasi anggaran yang bervariasi tiap tahunnya. Disposisi pelaksana menjadi kekuatan utama program, dengan banyaknya pelaksana yang bekerja melampaui tugas formal mereka. Namun, hal ini juga menandakan ketergantungan berlebihan pada semangat individu, yang seharusnya bisa dikompensasi dengan penguatan kelembagaan. Sementara itu, struktur birokrasi secara umum sudah tertata, namun fleksibilitas dalam SOP dan lemahnya koordinasi antarunit masih menjadi hambatan yang mengganggu efektivitas di lapangan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik di sektor pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan pelayaran di wilayah pesisir. Temuan penelitian menegaskan pentingnya penguatan dimensi non-struktural seperti disposisi pelaksana, sekaligus perlunya dukungan struktural yang lebih adaptif terhadap dinamika geografis dan sosial masyarakat sasaran.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, pertama, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai strategi komunikasi publik yang efektif untuk masyarakat dengan keterbatasan literasi digital. Kedua, studi lanjutan sebaiknya menyoroti pengelolaan sumber daya manusia dalam program pelatihan multi-lokasi, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi para pelaksana. Ketiga, perlu dilakukan evaluasi longitudinal terhadap dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi peserta, serta bagaimana sertifikasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal melalui sistem pendampingan pasca-pelatihan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan evaluasi implementasi sebuah program kebijakan, tetapi juga memberikan panduan konseptual dan praktis untuk merancang kebijakan serupa di masa depan agar lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwinarni, N., Puspita, D. R., & Rosyadi, S. (2020). Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. *Jurnal Sadministrasi Publik Dan Pembangunan*, *11*(1), 37–47. 10.23960/administratio.v11i1.102

Agustina, E., & Imaniar, D. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pondok Mimbo Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Administrasi Kependudukan Dan Kemandirian Nelayan Empowerment of Pondok Mimbo Coastal Communities in an Effort to Increase Awareness of Population Administration and Fisherman. *Journal of Aquaculture Science*, *6*, 214–223. https://doi.org/10.31093/joas.v6i1IS.175

Amalia, F. (2024). Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Pasuruan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Aplikasi E-Sambat. *Jurnal Sosial Humaniora*, *1*(2), 200–219. https://jurnal.unigal.ac.id/mimbaragribisnis/article/view/14105

Anwar, Z., & Wahyuni, W. (2019). Miskin di laut yang kaya: nelayan Indonesia dan kemiskinan. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, *4*(1). https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/10622

Ghazy, A. B., & Adrian, A. B. (2025). Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Rencana Relokasi Permukiman Kumuh dan Pengaruhnya Terhadap Identitas Sosial Di RT. 26, Desa Kangkung. *Jurnal INTEGRA-STEM (Integrative Research in Science, Technology, Engineering, and Mathematics)*, *1*(1), 41–51. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/saintek/article/view/9329

Hasan, H. A., & Azlina, N. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Skema Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Dengan Swasta Dan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *10*(2), 90. https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/49831

Kamuli, S., Wantu, S. M., Hamim, U., Djafar, L., Sahi, Y., & Dahiba, H. (2023). Pemberdayaan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Bagi Masyarakat Pesisir di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Provinsi Sulawesi Utara. *Jambura Journal Civic Education*, *3*(2). https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jacedu/article/view/21827

Lomboan, D. V. Y., RURU, J., & LONDA, V. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, *7*(109). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jap/article/download/36289/33789

Mochklas, M., Panggayudi, D. S., Mauliddah, N., & Tyasha Ayu, M. S. (2023). Motivasi Kerja Memediasi Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Umkm Masyarakat Pesisir Surabaya. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, *7*(3), 305–327. https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/5475

Nikijuluw, V. P. (2001). Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. *IPB: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan*, 14–27. https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/24544/Laporan_Pelatihan_Pengelolaan_Wilayah_Pesisir-2.pdf?sequence=1

Nuryanto, N., & Haryono, H. (2017). Pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir pantai utara

Jawa Tengah melalui koperasi nelayan dan e-commerce. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, *18*(1), 49–63. https://jurnal.unimar-amni.ac.id/index.php/JSTM/article/view/157

Prasetya, B. P. (2024). Peran Literasi Keuangan Nelayan Dan Perilaku Rumah Tangga Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Pada Keluarga Nelayan Di Pelabuhan Sadeng, Gunungkidul, Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, *30*(1), 126–144. https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/93613

Prayuda, R. (2019). Strategi Indonesia dalam implementasi konsep Blue Economy terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di era masyarakat ekonomi Asean. *Indonesian Journal of International Relations*, *3*(2), 46–64. https://journal.aihii.or.id/index.php/ijir/article/view/90

Prihanta, W., Zainuri, A. M., Hartini, R., Syarifuddin, A., & Patma, T. S. (2020). Pantai Taman-Pacitan ecotourism development: Conservation and community empowerment orientation. *Journal of Community Service and Empowerment*, *1*(1), 1–16. 10.22219/jcse.v1i1.11515

Rahmanto, D., & Purwaningsih, E. (2016). Pemberdayaan masyarakat pesisir Pulau untungjawa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan kemandirian nelayan. *ADIL: Jurnal Hukum*, *7*(1), 111–125. 10.33476/ajl.v7i1.335

Ramadhani, A. A. (2023). Potensi keunggulan kompetitif sumber daya kelautan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)*, *12*(3), 291–296. 10.36272/jes.v12i3.296

Riesnandar, E., & Nuhartonosuro, I. M. (2025). Manajemen Sumber Daya Kelautan dalam Implementasi Blue Economy: Peluang dan Tantangan di Indonesia. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(4), 3645–3652. https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/7567

Sabarisman, M. (2017). Identifikasi dan pemberdayaan masyarakat miskin pesisir. *Sosio Informa*, *3*(3). 10.33007/inf.v3i3.707

Trihandoyo, A., Wahyudin, Y., Arkham, M. N., Mawardi, W., Rikardi, N., & Ramli, A. (2019). Kajian Singkat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Jasa Ekosistem Transplantasi Karang Di Perairan Kepulauan Biawak (Rapid Assessment of Community Based Empowerment Program Implementation on Coral Transplantation Ecosystem Servi. *Jurnal Cendekia Ihya*, *2*. http://jurnal.jomparnd.com/index.php/js/article/view/507/

Walizi, H., & Kom, S. (2025). Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Di Bappeda Muara Enim. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, *2*(2 Maret), 1707–1718. https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/206